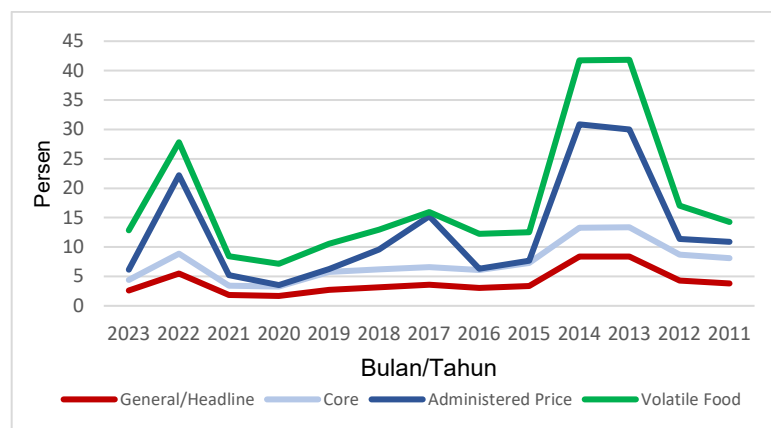


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kategori kuat adalah tingkat inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat dan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Inflasi di Indonesia terdiri atas tiga kategori utama antara lain komponen inti (*core inflation*), inflasi bergejolak (*volatile food*), dan komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*). Dari ketiganya, kelompok *volatile food* secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap inflasi nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat komoditasnya yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi maupun non-ekonomi, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, serta ketidakpastian pasokan dan distribusi.



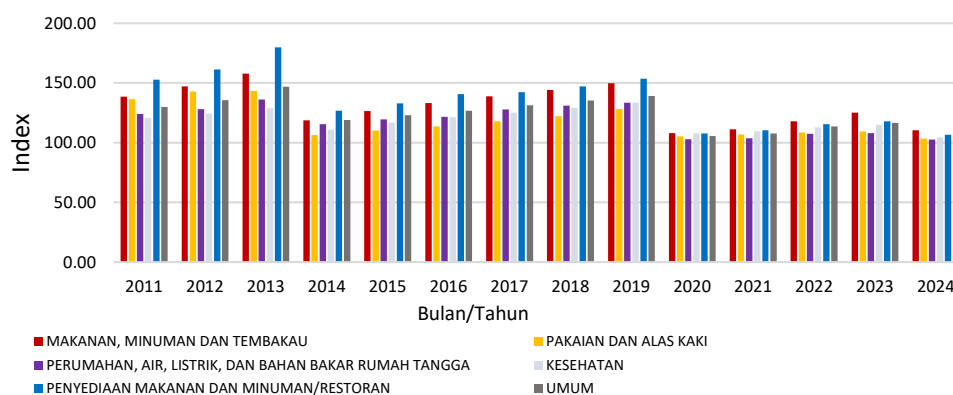
Gambar 1.1 Umum, Inti, Harga yang diatur pemerintah, dan harga yang bergejolak tahun 2011–2023 (%).

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Salah satu karakteristik utama inflasi di Indonesia adalah kontribusi signifikan dari kelompok harga yang rentan terhadap gejolak, yaitu *volatile food* dan *administered prices*. Seperti pada gambar 1.1, komponen inflasi *volatile food* menunjukkan fluktuasi yang jauh lebih tajam dibandingkan komponen lainnya.

Pada periode tahun 2022, terlihat lonjakan tajam pada inflasi *volatile food* yang mencapai lebih dari 11 persen, jauh melampaui komponen inflasi inti dan *administered prices*. Fenomena ini menandakan bahwa tekanan inflasi dari sisi *supply* khususnya bahan pangan, memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi umum. Komponen inflasi inti relatif stabil, mencerminkan ekspektasi inflasi dan kondisi permintaan domestik yang terkendali. *Administered prices* cenderung datar kecuali saat terjadi penyesuaian harga oleh pemerintah.

Fluktuasi harga komoditas pangan cukup ekstrem sehingga menjadi salah satu penyumbang Inflasi yang cukup besar. Terlebih pada kelompok *volatile food*. Menurut data BPS (Statistik Indonesia, 2024) *volatile food* adalah komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi. Menurut Bank Indonesia (2024), sekitar 40 persen dari bobot dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) berasal dari kelompok *volatile food* dan *administered prices*, yang sangat rentan terhadap berbagai shock, seperti fluktuasi musim panen dan gangguan alam. Oleh karena itu, memahami dinamika kelompok ini menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas harga.



Gambar 1.2 IHK Indonesia menurut kelompok pengeluaran tahun 2011 – 2024 (Index)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), data diolah

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) menurut kelompok pengeluaran di Indonesia, di mana kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menjadi salah satu yang konsisten mengalami peningkatan sebelum pandemi. Kenaikan ini mencerminkan tekanan inflasi dari sektor jasa makanan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan pada periode musiman seperti Ramadhan dan Hari Raya. Namun, saat pandemi Covid-19 indeks kelompok ini sempat menurun tajam akibat penurunan aktivitas masyarakat dan mengakibatkan penurunan domestik.

Setelah satu tahun berjalannya Pandemi Covid-19, pemerintah mulai menetapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif, dimana pelonggaran kebijakan moneter tersebut akan lebih berdampak pada kreditor daripada kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Seperti upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi Indonesia kembali tumbuh melalui tingkat suku bunga. Meskipun terjadi pemulihan pasca pandemi, tren pertumbuhannya belum kembali ke pola sebelum krisis. Pergerakan indeks ini mencerminkan bahwa sektor penyediaan makanan memainkan peran penting dalam pembentukan inflasi pangan nasional, baik melalui perubahan harga bahan baku maupun perilaku konsumsi masyarakat.

Inflasi makanan memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Artinya, harga bahan makanan seperti beras, sayuran, daging, telur, dan produk pangan lainnya mengalami peningkatan yang signifikan (Bappeda, 2020). Hal ini karena proporsi pengeluaran mereka terhadap bahan makanan sangat besar. Kelompok ini sangat rentan terhadap

gejolak harga pangan karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk konsumsi bahan makanan.

Temuan Yuliana et al. (2019), yang menunjukkan bahwa rumah tangga miskin mengalami penurunan kesejahteraan yang lebih besar akibat kenaikan harga pangan dibandingkan rumah tangga non-miskin. Kenaikan harga pangan akan menekan daya beli, meningkatkan angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial. Selain itu, karena komoditas pangan merupakan komponen utama dalam perhitungan garis kemiskinan, maka lonjakan harga pangan secara langsung akan menaikkan garis kemiskinan nasional (BPS). Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan inklusif serta menghambat upaya pemerintah dalam menekan ketimpangan.

Namun, di Indonesia inflasi makanan merupakan komponen yang sering kali mengalami fluktuasi tinggi dan memiliki kontribusi besar terhadap inflasi secara keseluruhan. Hal ini menjadikan inflasi makanan sebagai isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter. Pertama-tama, konsumen dipengaruhi oleh harga pangan (Kornher & Kalkuhl, 2013). Harga pangan memiliki konotasi politik yang mencerminkan kebijakan dan program pemerintah. Pentingnya stabilitas harga pangan terlihat dari kontribusinya terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK).

IHK makanan memperlihatkan kecenderungan yang berfluktuasi tajam dari waktu ke waktu. Komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah sering kali menjadi penyebab utama ketidakstabilan inflasi makanan. Di antara semua, beras memiliki dampak paling besar karena merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Farizi dan Kornitasari (2023) menunjukkan bahwa harga beras memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan inflasi. Hal ini diperparah

ketika terjadi gangguan pasokan seperti saat krisis atau selama pandemi Covid-19. Meskipun pada 2020 inflasi relatif lebih rendah, hal ini bukan disebabkan oleh perbaikan pasokan melainkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi (Zulkipli, 2021).

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat, terutama melalui hilangnya pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan turunnya aktivitas ekonomi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya konsumsi rumah tangga, termasuk konsumsi bahan pangan, yang pada akhirnya memicu deflasi di beberapa kelompok pangan (Adawiyah & Solichati, 2020). Selain itu, pemerintah juga cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuaian harga, sehingga tekanan inflasi dari kelompok *administered prices* sempat menurun dalam periode tersebut.

Tantangan perubahan iklim dalam dua tahun terakhir semakin diperparah oleh pandemi Covid-19, yang berdampak besar pada sistem produksi dan distribusi pangan global. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya tekanan geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina, yang memperparah krisis pangan dunia. Kombinasi antara pandemi dan konflik tersebut memicu disrupsi rantai pasok serta mendorong lonjakan harga pangan di pasar internasional. Situasi ini menegaskan pentingnya untuk mengidentifikasi secara lebih komprehensif berbagai faktor penyebab inflasi pangan, baik yang bersumber dari domestik maupun global, guna merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih adaptif dan tepat sasaran (PSEKP Kementan, 2022).

Disrupsi terhadap ketersediaan pangan di pasar internasional didorong oleh meningkatnya harga input produksi seperti pupuk dan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga pupuk menjadi ancaman serius bagi

sektor pertanian global karena berdampak langsung pada biaya produksi dan hasil panen. Pembatasan ekspor pupuk oleh negara produsen utama seperti Rusia, Belarus, dan Tiongkok yang membatasi ekspor sejak awal 2022 memicu kelangkaan pasokan pupuk secara global, sehingga harga pupuk melonjak tajam. Kenaikan biaya input ini meningkatkan ongkos produksi dan berisiko menurunkan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan secara global. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama naiknya harga pangan di berbagai belahan dunia (PSEKP Kementan, 2022).

Ketidakstabilan ini memperkuat urgensi untuk memahami penyebab inflasi pangan, baik dari faktor domestik maupun global. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat persistensi inflasi di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia (Alamsyah, 2001). Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya persistensi tersebut adalah inflasi makanan yang terus berulang dan sulit dikendalikan dalam jangka pendek (Affandi, 2011). Stabilitas harga pangan merupakan komponen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Inflasi pangan yang tinggi dapat mengikis daya beli, meningkatkan angka kemiskinan, dan bahkan mengganggu stabilitas sosial. Penelitian oleh Son dan Kakwani (2009), serta Son (2008), menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Brasil dan Filipina, inflasi bahan makanan memberi dampak lebih merugikan terhadap masyarakat miskin dibanding inflasi jenis lain.

Di Indonesia Pratikto et al. (2015) menyatakan bahwa perubahan harga bahan makanan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi pangan perlu mendapat perhatian serius dari sisi

kebijakan moneter maupun pengelolaan sektor pangan secara keseluruhan. Setelah satu tahun berjalannya Pandemi Covid-19 pemerintah mulai menetapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif, dimana pelonggaran kebijakan moneter tersebut akan lebih berdampak pada kreditor daripada kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Seperti upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi Indonesia kembali tumbuh melalui tingkat suku bunga.

Harga pangan menjadi salah satu hal yang selalu menjadi perhatian karena dapat menyebabkan efek negatif terhadap tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat. Peningkatan harga yang terjadi pada suatu komoditas akan berdampak pada menurunnya pendapat riil masyarakat yang disebabkan oleh menurunnya nilai mata uang, sehingga hal tersebut nantinya akan mengurangi konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap pangan yang menjadi kebutuhan pokok. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) bahan pangan pokok yang menjadi prioritas di Indonesia meliputi beras, ikan, daging ayam, daging sapi/kerbau, telur ayam/bebek/itik, jagung, dan kedelai. Komoditas ini berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional (Kementan, 2018).

Kebijakan moneter memainkan peran penting sebagai alat utama bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) sebagai instrumen utama dalam transmisi kebijakan moneter. Menurut Warjiyo dan Juhro (2019), penyesuaian suku bunga sebagai bagian dari transmisi kebijakan moneter dapat memengaruhi biaya pinjaman, konsumsi, dan investasi. Kenaikan suku bunga bertujuan untuk menurunkan tekanan permintaan agregat, sedangkan penurunan suku bunga

diharapkan mampu merangsang konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya berdampak terhadap tekanan inflasi, termasuk pada sektor pangan.

Kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia (BI) bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro termasuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahwa faktor sisi permintaan seperti pendapatan juga dapat memengaruhi biaya pangan yang lebih tinggi, dan dengan demikian moderasi permintaan agregat (dalam yurisdiksi bank sentral) dapat menjadi solusi yang efektif. Kesepakatan dalam literatur adalah bahwa pengeluaran makanan oleh rumah tangga di negara-negara berkembang sangat besar dan mendominasi konsumsi rumah tangga (Alper *et al.*, 2016).

Penyesuaian suku bunga berdampak langsung pada biaya pinjaman dan konsumsi, yang kemudian memengaruhi permintaan dan penawaran dalam perekonomian termasuk harga pangan. Ketika BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengatasi inflasi, bank komersial menyesuaikan suku bunga kredit sehingga biaya pinjaman meningkat. Penurunan suku bunga acuan BI *7days repo-rate* (BI 7DRR) diketahui dapat menyebabkan suku bunga kredit turun, sehingga pelanggaran kebijakan moneter pada akhirnya akan meningkatkan daya beli kreditor. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi (Warjiyo, 2021). Penurunan suku bunga diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional (Herania, 2022)

Efektivitas kebijakan suku bunga dalam mengendalikan inflasi pangan sering kali dipertanyakan. Dalam beberapa kondisi, meskipun BI menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, harga pangan tetap menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh sisi permintaan yang bisa diatur oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh sisi

penawaran dan faktor eksternal lainnya. Suku bunga yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan investasi di sektor pertanian atau distribusi pangan, sehingga menghambat produksi dan memperburuk tekanan harga.

Kebijakan moneter tradisional yang berorientasi pada sisi permintaan sering kali kurang efektif saat inflasi didorong oleh gangguan pasokan atau dari sisi penawaran seperti lonjakan harga pangan akibat cuaca ekstrem atau disruption distribusi. Dalam konteks ini, efektivitas instrumen seperti suku bunga perlu ditelaah lebih jauh. Bank Indonesia (2016) menekankan bahwa penyesuaian BI Rate memengaruhi konsumsi dan investasi melalui perubahan suku bunga kredit dan deposito, serta membentuk ekspektasi pasar. Namun, dalam kasus inflasi pangan, respons terhadap kebijakan ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor eksternal dan volatilitas harga komoditas.

Lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) (2011) menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap volatilitas harga pangan sering kali muncul bersamaan dengan kekhawatiran terhadap lonjakan harga secara keseluruhan. Komoditas pangan, terutama yang berbasis pertanian, cenderung memiliki tingkat volatilitas yang tinggi karena sensitivitasnya terhadap perubahan iklim, kebijakan ekspor-impor, serta dinamika pasokan global. Volatilitas ini tidak hanya mencerminkan fluktuasi harga yang cepat dan tidak terduga, tetapi juga menjadi tantangan nyata bagi stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Perubahan harga yang tidak stabil pada komoditas pangan, terutama beras yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, memiliki posisi penting dalam pola konsumsi rumah tangga. Ketergantungan yang tinggi terhadap beras membuat setiap kenaikan atau

penurunan harga komoditas ini berpengaruh secara langsung terhadap laju inflasi pangan. Selain itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri, sehingga harus mengandalkan impor yang menjadikan harga beras domestik sensitif terhadap dinamika pasar global. Studi Anwar (2023) mengemukakan bahwa harga komoditas pokok, seperti beras, dapat berfungsi sebagai variabel perantara dalam transmisi kebijakan moneter ke tekanan inflasi, terutama di negara berkembang. Sebagai pendukung empiris, Rahmanta et al. (2020) menemukan bahwa fluktuasi harga beras memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara, terutama saat pasokan terganggu.

Tekanan harga global juga tercermin dalam pergerakan *World Food Index* (WFI) yang disusun oleh FAO. Indeks ini mengukur harga komoditas pangan utama secara internasional dan menjadi indikator penting untuk menilai tekanan global terhadap sistem pangan nasional. Naiknya WFI sebagai akibat dari gangguan pasokan global, konflik geopolitik, atau cuaca ekstrem dapat memicu kenaikan harga pangan di Indonesia melalui jalur impor atau ekspektasi pasar. Namun, pengaruh WFI terhadap inflasi pangan domestik masih jarang dikaji secara mendalam dalam konteks Indonesia.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu guncangan eksogen terbesar dalam beberapa dekade terakhir yang tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga sistem pangan dan perekonomian secara keseluruhan. Pembatasan mobilitas, terganggunya rantai pasok, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan tekanan pada distribusi dan harga pangan. Kebijakan moneter juga mengalami tekanan baru, di mana pelonggaran suku bunga tidak serta-merta mampu menstimulasi ekonomi secara optimal karena

terhambatnya aktivitas produksi dan distribusi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini variabel dummy pandemi Covid-19 digunakan untuk menangkap dampak struktural terhadap inflasi pangan selama periode krisis tersebut.

Berbagai faktor saling berinteraksi dalam membentuk tekanan inflasi, mulai dari kebijakan moneter seperti suku bunga, kondisi pasar domestik terkait produksi dan distribusi pangan, hingga tekanan eksternal seperti fluktuasi harga pangan global dan guncangan eksogen seperti pandemi. Kompleksitas tersebut menuntut pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan berbasis data empiris, agar dinamika inflasi pangan dapat dijelaskan secara menyeluruh dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji inflasi pangan di Indonesia, namun sebagian besar masih terbatas pada pengaruh suku bunga terhadap inflasi umum atau tidak secara spesifik menyoroti sektor pangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Beureukat (2022). Banyak studi sebelumnya membahas faktor-faktor yang memengaruhi inflasi pangan, seperti fluktuasi harga komoditas, gangguan distribusi, produksi domestik, serta faktor musiman dan iklim. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menganalisis aspek struktural dan sektoral secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan instrumen kebijakan moneter.

Berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Pinchoff et al. (2021) di Nairobi, yang secara eksplisit menghubungkan dampak kebijakan moneter dengan dinamika sektor rumah tangga dan struktur ekonomi lokal terutama suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Padahal, dalam kerangka teori moneter modern transmisi kebijakan suku bunga dapat memengaruhi permintaan agregat termasuk konsumsi pangan, serta ekspektasi inflasi secara

keseluruhan. Kurangnya pendekatan yang menghubungkan dinamika inflasi pangan dengan variabel-variabel moneter menunjukkan adanya celah dalam literatur, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki pasar pangan kompleks dan rentan terhadap fluktuasi harga.

Studi sebelumnya juga belum secara komprehensif mengintegrasikan variabel global seperti *World Food Index* atau dampak guncangan besar seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menguji pengaruh suku bunga, harga beras, *World Food Index*, dan pandemi Covid-19 terhadap inflasi pangan di Indonesia dengan pendekatan Error Correction Model (ECM) dengan data bulanan periode 2011–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan moneter dan pangan yang lebih responsif dan terintegrasi dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi pangan adalah prasyarat penting dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus untuk menganalisis bagaimana inflasi pangan di Indonesia merespons perubahan suku bunga, volatilitas harga beras, indeks harga pangan global, serta faktor non-ekonomi seperti pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan moneter yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika sektor pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi pangan di Indonesia pada periode 2011–2024?
2. Apakah harga beras berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi pangan di Indonesia pada periode 2011–2024?
3. Apakah World Food Index (WFI) berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi pangan di Indonesia pada periode 2011–2024?
4. Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi pangan di Indonesia pada periode 2011–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap inflasi pangan di Indonesia. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap inflasi pangan di Indonesia periode 2011–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh harga beras terhadap inflasi pangan di Indonesia periode 2011–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh World Food Index (WFI) terhadap inflasi pangan di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang periode 2011–2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap inflasi pangan di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang periode 2011–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya dalam studi dampak kebijakan moneter terhadap inflasi pangan di Indonesia dengan memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai inflasi pangan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Temuan empiris terkait bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap inflasi pangan akan memperkaya diskusi teoritis mengenai efektivitasnya.
2. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan model-model ekonomi yang lebih akurat dalam memprediksi dan menjelaskan kebijakan moneter yang mempengaruhi inflasi pangan di Indonesia. Model tersebut dapat digunakan oleh akademisi untuk lebih memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi seperti kebijakan moneter, dan faktor global lainnya memengaruhi harga pangan di tingkat domestik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang perkembangan inflasi pangan dan memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi pangan, sebagai pertimbangan membuat kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian harga komoditas pangan.
2. Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya, khususnya untuk penelitian yang membahas topik serupa di masa depan.